

ABSTRAK

PLTU Batang adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun di Kabupaten Batang yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional di Wilayah Jawa dan Bali. PLTU tersebut terletak di tiga desa yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng, dekat Laut Ujungnegoro. Diantara ketiga desa tersebut, Karanggeneng mendapatkan dampak terbesar karena mayoritas warganya mengalami dampak pembangunan PLTU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan pengembangan PLTU terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Karanggeneng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dalam penelitian ini Penulis melakukan peninjauan dari aspek hukumnya untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan peran notaris dalam pembebasan lahan dalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PLTU Batang berpengaruh terhadap masyarakat Desa Karanggeneng yang terpaksa menjual tanahnya, masa depan masyarakat setempat juga terpengaruh karena adanya pemindahan fungsi lahan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Kebijakan PLTU berdampak pada kondisi saat ini dan masa yang akan datang yaitu meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di Desa Karanggeneng, namun bentuk tanggung jawab PT PBI adalah pembentukan KUB bagi masyarakat terdampak, disarankan agar pembangunan PLTU Batang harus lebih memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembebasan lahan atau tanah untuk pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, dimana terdapat peran notaris dalam pembuatan akta otentiknya. Panitia Pengadaan Tanah (P2T), mengacu pada peraturan pengadaan tanah pada waktu itu. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Panitia Pengadaan tanah merubah peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga memberikan ganti rugi berupa uang dalam pelepasan tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Notaris membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Akta Pengakuan Hutang dalam pengadaan tanah tersebut sedangkan pengadaan tanah tersebut adalah di atas tanah negara, sehingga tidak ada pelepasan hak atas tanah pada perbuatan hukum tersebut.

Kata Kunci : PLTU, Kepentingan Umum, Pembebasan Lahan, Notaris

ABSTRACT

PLTU Batang is a steam power plant built in Batang Regency which is expected to meet the national electricity needs in the Java and Bali regions. The PLTU is located in three villages, namely Ujungnegoro, Karanggeneng and Ponowareng, near the Ujungnegoro Sea. Among the three villages, Karanggeneng had the biggest impact because the majority of its residents experienced the impact of the PLTU construction. The purpose of this study was to evaluate the influence of the PLTU development policy on the social life of the Karanggeneng Village community. This study uses a sociological juridical method, namely in this study the author conducts a review of the legal aspects to find out the applicable regulations, especially those relating to the role of notaries in deep land acquisition. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation.

The results showed that the existence of PLTU Batang affected the people of Karanggeneng Village who were forced to sell their land, the future of the local community was also affected because of the transfer of land functions which resulted in the community losing their livelihoods. The PLTU policy has an impact on current and future conditions, namely increasing unemployment and poverty in Karanggeneng Village, but the form of PT PBI's responsibility is the establishment of a KUB for affected communities, it is suggested that the construction of PLTU Batang must pay more attention to the socio-economic conditions of the community.

This study aims to determine the process of land or land acquisition for PLTU development in Batang Regency, where there is a notary's role in making authentic deeds. Land Procurement Committee (P2T), refers to the land acquisition regulations at that time. This type of research is sociological juridical. The Land Acquisition Committee changes the designation of the Regional Spatial Planning (RTRW), also provides compensation in the form of money in the release of land that does not have ownership rights based on the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation Number 24 of 1997. Notaries make the Deed of Releasing Rights to Land and the Deed of Debt Recognition in the said land acquisition, while the land acquisition is on state land, so there is no relinquishment of land rights in the legal act.

Keywords: PLTU, Public Interest, Land Acquisition, Notary